



# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Gelanggang Tenis Kab. Mamuju



Tugu SMART Pasangkayu



PUSAT OLEH OLEH  
MAMUJU

Triwulan III  
2019

**Tim Penyusun:**

**Penanggung jawab:** Kakanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat

**Ketua Tim:** Ikhwani Mahmud **Editor & Grafis:** Budy Prastowo

**Anggota:** Christmas Kurnianto | Edy Suherman | Mardiyana |  
Wisnu Sri Baroto | Lusi Triyani



# Kata Pengantar

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Barat Triwulan III Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Kajian ini bukan hanya sebagai salah satu output pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat di bidang pelaksanaan fiskal di daerah, namun juga sebagai wujud sumbangsih kami terhadap perkembangan pembangunan dan perekonomian di wilayah Sulawesi Barat. Kami berharap, kajian ini dapat menjadi salah satu rujukan informasi yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan makroekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, para Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan Badan Keuangan Daerah, pimpinan satuan kerja pemerintah daerah se-Sulawesi Barat, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama lingkup Sulawesi Barat, dan pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu atas kontribusi berupa penyediaan informasi dan kerja samanya yang bermanfaat dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun kajian ini tidak lepas dari kekurangan. Untuk itu, penyusun sangat menghargai usul, saran, dan kritik yang membangun guna perbaikan kajian ini di masa yang akan datang. Akhir kata, kami berharap kajian ini memberi manfaat untuk para pembaca dan pelaku pembangunan di Sulawesi Barat.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Mamuju, November 2019  
Plt. Kepala Kantor,

Fahma Sari Fatma

## DAFTAR ISI

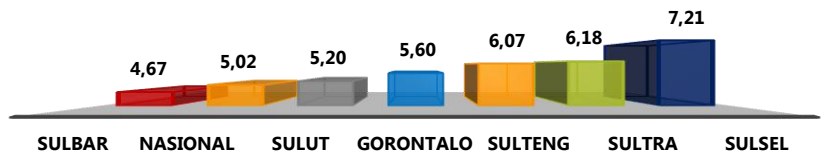
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....</b>	<b>1</b>
1.1 Produk Domestik Regional Bruto .....	1
1.2 Inflasi .....	2
1.3 Indikator Kesejahteraan .....	3
<b>BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN .....</b>	<b>5</b>
2.1 Pendapatan Negara.....	5
2.2 Belanja Negara.....	7
2.3 Prognosis Realisasi APBN .....	10
<b>BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD .....</b>	<b>11</b>
3.1 Pendapatan Daerah.....	12
3.2 Belanja Daerah .....	14
3.3 Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Akhir Tahun 2019 .....	15
<b>BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) .....</b>	<b>17</b>
4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....	17
4.2 Pendapatan Konsolidasian.....	17
4.3 Belanja Konsolidasian.....	19
4.4 Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB .....	21
<b>BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....</b>	<b>22</b>
5.1 Urgensi Optimalisasi Peran Fiskal dalam Upaya Mengakselerasi Laju Perekonomian Sulbar.....	22

## DAFTAR TABEL

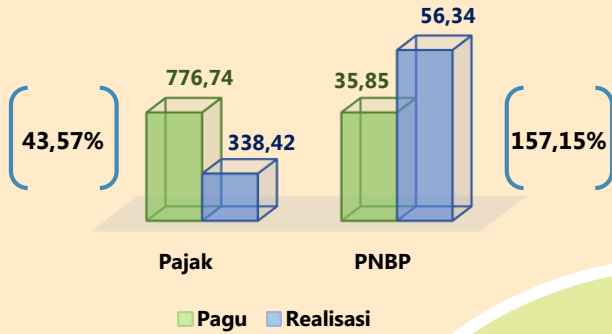
Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi APBN Sulbar s.d. Akhir Triwulan III 2018 - 2019 .....	5
Tabel 2.2	Perkembangan Aset dan Realisasi PNBPN Satker pengguna PNBPN .....	8
Tabel 2.3	Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi Triwulan III Tahun 2018-2019 .....	9
Tabel 2.4	Perkiraan Realisasi APBN lingkup Sulbar s.d. Triwulan IV 2019 .....	10
Tabel 3.1	Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulbar s.d. Triwulan III 2019 .....	11
Tabel 3.2	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Sulbar s.d. Triwulan IV 2019 .....	16
Tabel 4.1	LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Sulbar s.d. Triwulan III 2019 .....	17
Tabel 4.2	Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Sulbar Triwulan III 2018-2019 .....	19
Tabel 4.3	Kontribusi Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap PDRB Sulbar s.d. Triwulan III 2019 .....	21

## DAFTAR GRAFIK

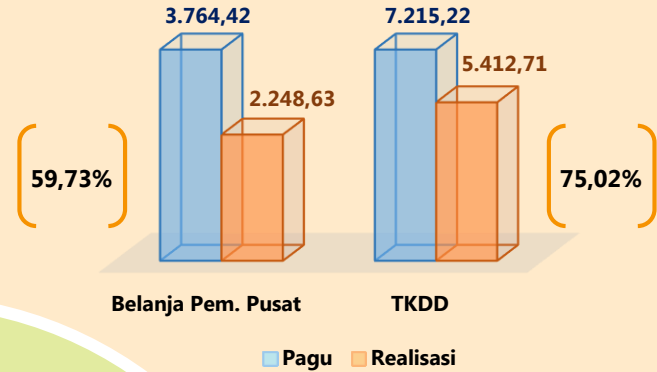
Grafik 1.1	Pertumbuhan PDRB Prov. Sulbar per Triwulan 2018 - 2019 .....	1
Grafik 1.2	Komposisi PDRB (ADHB) Prov. Sulbar Triwulan III 2019 .....	2
Grafik 1.3	Inflasi Bulanan (m to m) dan Tahunan (yoy) Sulawesi Barat dan Nasional .....	2
Grafik 1.4	Tren Tingkat Kemiskinan Sulbar 2016-2019 .....	3
Grafik 1.5	Tren TPT Sulbar 2016 - 2019 .....	3
Grafik 1.6	IPM Sulbar per kabupaten tahun 2017-2018.....	4
Grafik 2.1	Realisasi Penerimaan Pajak s.d. Triwulan III 2019 per Jenis Pajak .....	5
Grafik 2.2	Realisasi Penerimaan PPh lingkup Sulbar Triwulan III 2019 .....	5
Grafik 2.3	Realisasi Penerimaan PPN lingkup Sulbar.....	6
Grafik 2.4	Realisasi Penerimaan PPnBM lingkup Sulbar .....	6
Grafik 2.5	Realisasi Penerimaan Pajak Lainnya lingkup Sulbar .....	6
Grafik 2.6	Realisasi Empat Jenis PNPB Terbesar di Sulbar s.d. Triwulan III 2019 .....	7
Grafik 2.7	Tren Realisasi Belanja per Jenis Belanja Lingkup Sulbar Triwulan III 2019 .....	7
Grafik 2.8	Tren Persentase Realisasi TKDD Lingkup Sulbar Triwulan III 2019 .....	8
Grafik 2.9	Lima Besar Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi di Sulbar Triwulan III 2019 .....	9
Grafik 2.10	Penyaluran Pembiayaan UMi per Wilayah di Sulbar Triwulan III Tahun 2019.....	10
Grafik 3.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lingkup Sulbar Triwulan III 2019 .....	12
Grafik 3.2	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Lingkup Sulbar Triwulan III 2019.....	12
Grafik 3.3	Realisasi Penerimaan HKDYYD Sulbar Triwulan III 2019 .....	13
Grafik 3.4	Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Sulbar Triwulan III 2019 .....	13
Grafik 3.5	Pagu dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja .....	14
Grafik 3.6	Realisasi per Jenis Belanja Modal Lingkup Sulbar s.d.Triwulan III 2019 .....	14
Grafik 3.7	Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Lingkup Sulbar s.d. Triwulan III 2019 .....	15
Grafik 3.8	Realisasi Pendapatan APBD .....	15
Grafik 3.9	Realisasi Belanja APBD.....	15
Grafik 4.1	Proporsi Pendapatan Konsolidasian Sulbar Triwulan III Tahun 2019 .....	17
Grafik 4.2	Perubahan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Sulbar Triwulan III 2018-2019 ..	18
Grafik 4.3	Proporsi Belanja Konsolidasian Sulawesi Barat Triwulan III 2019 .....	19
Grafik 4.4	Perubahan Realisasi Belanja Konsolidasian Sulbar Triwulan III 2018-2019.....	20
Grafik 4.5	Hubungan Pertumbuhan Belanja Konsolidasian dan Indikator Ekonomi Sulbar ...	20
Grafik 5.1	Perkembangan PDRB Sulbar dan PDB Nasional Tahun 2016 - 2019.....	22
Grafik 5.2	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Sulbar Triwulan III 2019.....	23
Grafik 5.3	Perkembangan Realisasi APBN Sulbar s.d. Triwulan III per Jenis Belanja .....	23



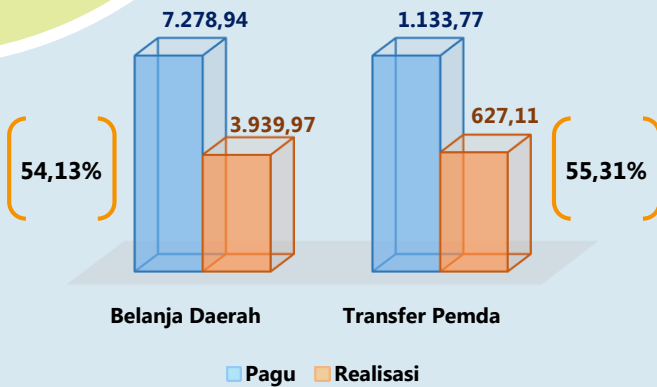
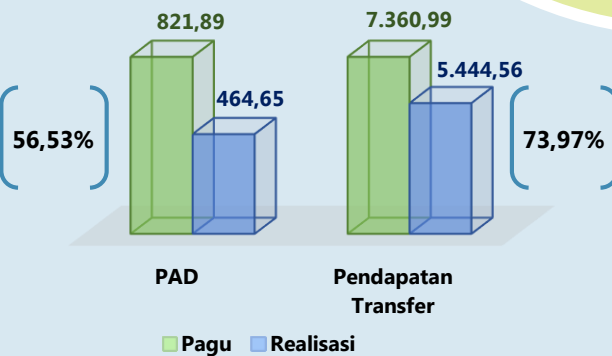
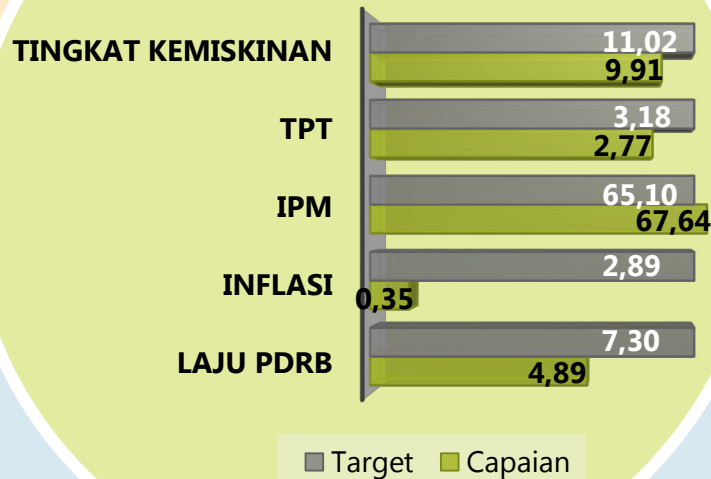
### PENDAPATAN APBN



### BELANJA APBN



### CAPAIAN MAKROEKONOMI SULBAR



### PENDAPATAN APBD

### BELANJA APBD

#### BERITA/ISU FISKAL TERPILIH

“Urgensi Optimalisasi Peran Fiskal dalam Upaya Mengakselerasi Laju Perekonomian Sulbar”

Halaman ini sengaja dikosongkan



# BAB 1 PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

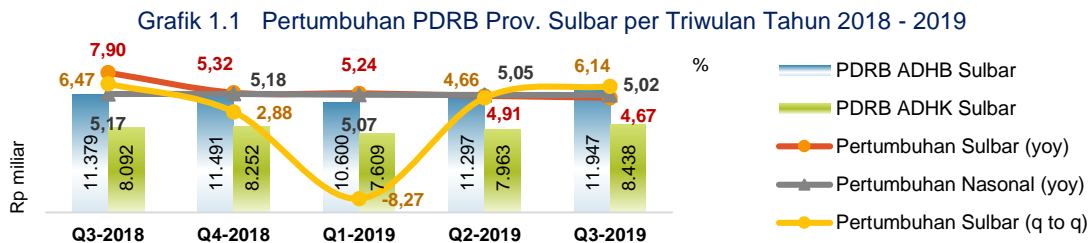
HIGHLIGHTS CAPAIAN PEMBANGUNAN SULBAR	Indikator Ekonomi	Target RPJMD 2019	Realisasi (s.d. Q-III 2019)	Realisasi Nasional (s.d. Q-III 2019)
	Pertumbuhan Ekonomi (c to c)	7,3% - 7,6%	4,89%	5,04%
	Inflasi	2,89%	0,35%	2,20%
	IPM	67,64	65,10*	71,39*
	TPT	2,77%	3,18%	5,29%
	Tingkat Kemiskinan	9,91%	11,02%	9,41%

Sumber: RPJMD Provinsi Sulbar Tahun 2017-2022; BPS Sulbar dan Nasional, 2019 (diolah)

## 1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Ekonomi Sulawesi Barat (Sulbar) yang tercermin dari PDRB pada triwulan III 2019 tumbuh 4,67 persen (yoy). Sama seperti triwulan kedua, PDRB Sulbar tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata nasional (PDB) yang juga melambat pada laju 5,02 persen (yoy). Selain karena dampak pelambatan ekonomi global, tren pelambatan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi Sulbar juga dipengaruhi oleh hasil produksi tanaman pangan yang menurun sebagai akibat dari curah hujan yang belum optimal. Secara kumulatif, pertumbuhan sementara PDRB Sulbar yang sebesar 4,89 persen masih terpaut jauh dari target RPJMD Sulbar yang diharapkan tumbuh pada kisaran 7,3-7,6 persen.

**PDRB Sulbar** triwulan III 2019 tumbuh 4,67% (yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan nasional 5,02% (yoy)

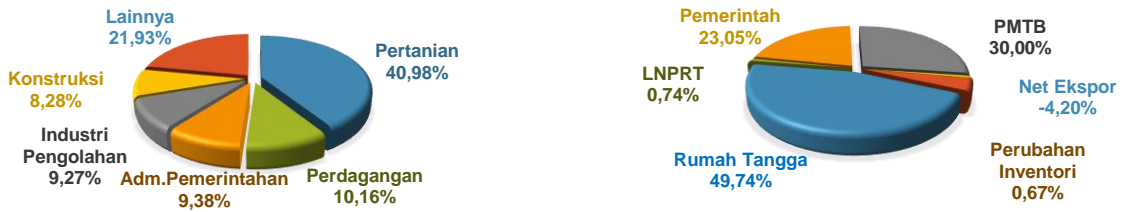


Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2018-2019 (diolah)

Struktur pembentuk PDRB Sulbar yang sebesar Rp11,95 triliun (ADHB) dilihat dari sisi produksi masih bertumpu pada sektor Pertanian dengan *share* sebesar Rp4,89 triliun (41 persen). Sebagai penyokong terkuat terhadap perekonomian Sulbar, maka sektor ini juga menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulbar dengan andil 1,82 persen (yoy). Pada triwulan ketiga ini aktivitas administrasi pemerintah lebih terpacu dan pada saat yang sama, aktivitas Industri Pengolahan sedikit melambat. Kondisi dimaksud membuat sektor Administrasi Pemerintahan menggeser posisi sektor Industri Pengolahan yang pada triwulan sebelumnya menjadi kontributor terbesar ketiga.

**PDRB Sulbar** dari sisi produksi berumpu pada sektor Pertanian, sedangkan dari sisi pengeluaran ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga.

Grafik 1.2 Komposisi PDRB ADHB Prov. Sulbar Sisi Produksi dan Pengeluaran Triwulan III 2019




Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

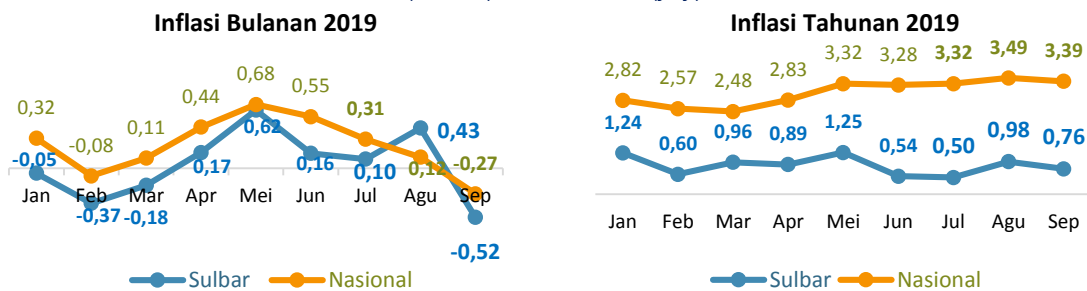
Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menopang hampir separuh PDRB Sulbar dengan kontribusi sebesar Rp5,94 triliun (49,74 persen), diikuti oleh PMTB dan Konsumsi Pemerintah (PKP). Pada periode ini, PKP tumbuh 37,32 persen (*q to q*) hingga memperkuat kontribusi belanja pemerintah terhadap struktur PDRB Sulbar yang pada triwulan II 2019 hanya sebesar 18,18 persen kini menjadi 23,05 persen. Akan tetapi, tren positif yang terjadi pada perbandingan triwulanan tidak terjadi pada perbandingan tahunan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya komponen PKP justru berkontraksi sebesar 1,91 persen.

### 1.2 Inflasi

Secara bulanan, Sulbar mengalami inflasi yang berfluktuasi selama kuartal ketiga 2019. Inflasi tertinggi terjadi pada Agustus yang berkorelasi dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Tingginya permintaan terhadap komoditas seperti cabe besar untuk keperluan olahan daging kurban memicu lonjakan harga pada bulan berkenaan dengan andil 0,19 persen. Biaya pendidikan juga turut memberi andil inflasi sebesar 0,07 persen. Memasuki September 2019 terjadi penurunan indeks harga pada tiga kelompok pengeluaran yaitu kelompok Bahan Makanan 2,67 persen, Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0,06 persen, serta Komunikasi dan Jasa Keuangan 0,01 persen. Penurunan indeks harga tersebut berkontribusi terhadap terjadinya deflasi terdalam hingga menyentuh angka 0,52 persen pada penghujung periode triwulan ketiga.

 Inflasi tertinggi pada kuartal ketiga terjadi pada Agustus sebesar 0,98 yang berkorelasi dengan perayaan Hari Raya Idul Adha.

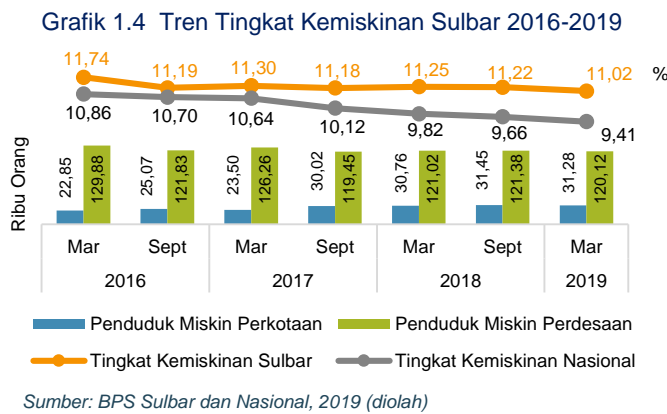
Grafik 1.3 Inflasi Bulanan (*m to m*) dan Tahunan (*yoy*) Sulawesi Barat dan Nasional



Sumber: BPS Sulbar, 2019 (diolah)

Berbeda dengan tren inflasi bulanan, inflasi tahunan Sulbar tampak searah dengan inflasi tahunan nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi Sulbar tahun ini jauh lebih terkendali. Meskipun pada Agustus 2019 grafik pergerakan inflasi tahunan Sulbar meningkat ke angka 0,98 persen, namun pada akhir kuartal ketiga inflasi kembali turun pada angka 0,76 persen. Secara kumulatif, angka inflasi sementara sampai dengan triwulan III (c to c) sebesar 0,35 persen sesuai target inflasi Sulbar dalam RPJMD yang diharapkan terkendali agar tidak melampaui 2,89 persen.

### 1.3 Indikator Kesejahteraan



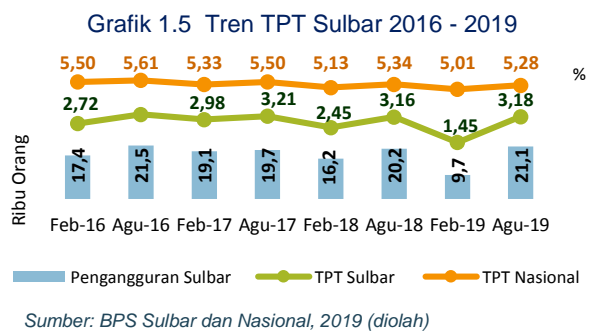
Secara umum, profil kemiskinan Sulbar mengalami perbaikan selama empat tahun terakhir, cenderung mengikuti tren nasional. Pada periode Maret 2019, tingkat kemiskinan Sulbar sebesar 11,02 persen, capaian terbaik selama Provinsi Sulbar terbentuk.

Tingkat Kemiskinan Sulbar 11,02% merupakan capaian terbaik sejak Sulbar terbentuk, namun belum mencapai target RPJMD sebesar 9,91%.

Kemajuan tersebut berkorelasi dengan beberapa hal, antara lain karena selama periode September 2018 sampai dengan Maret 2019 tingkat inflasi umum Sulbar lebih rendah dan terkendali; sektor industri tumbuh 4,09 persen; serta sektor transportasi dan perdagangan juga tumbuh 3,01 persen.

Di samping itu, panen raya yang terjadi sekitar Februari-Maret serta adanya program *cash for work* Dana Desa telah banyak menyerap tenaga kerja perdesaan sehingga berkontribusi meningkatkan penghasilan masyarakat desa hingga di atas garis kemiskinan. Akan tetapi, di sisi lain capaian dimaksud belum mencapai target tingkat kemiskinan dalam RPJMD Sulbar yang diharapkan dapat ditekan hingga 9,91 persen dan masih cukup tertinggal dibandingkan capaian rata-rata nasional yang lebih progresif mencapai 9,41 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulbar periode Agustus 2019 tercatat 3,18 persen. Angka tersebut melonjak dari kondisi Februari dan juga lebih tinggi dibandingkan Agustus 2018.

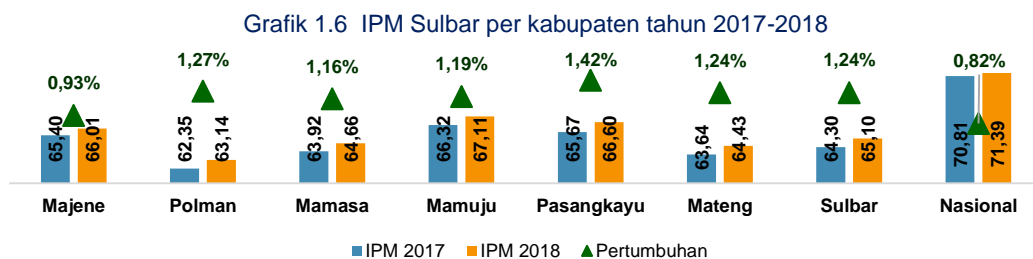


TPT Sulbar periode Agustus 2019 sebesar 3,18% melonjak dibandingkan Februari 2019 dengan pengangguran terbanyak lulusan SMK.

Pola TPT yang lebih tinggi pada periode Agustus salah satunya berhubungan dengan periode tahun ajaran baru, sehingga pada saat pelaksanaan survei terdapat banyak penduduk yang baru tamat sekolah dan belum mendapat pekerjaan. Dilihat dari sektor yang menyerap tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi sektor paling dominan disusul oleh sektor perdagangan.

Secara absolut jumlah pengangguran bertambah sebanyak 830 orang (yoy). Ditinjau dari tingkat pendidikannya, pengangguran paling banyak berasal dari kelompok tamat SMK. Pemerintah perlu meninjau kembali kurikulum SMK agar dapat lebih disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Kemudian jika dibandingkan dengan target pemerintah Sulbar dalam RPJMD sebesar 2,77 persen, maka periode ini pemerintah belum berhasil menekan angka pengangguran walaupun pada periode Februari 2019 Sulbar mencatat prestasi dengan TPT 1,45 persen, terendah kedua tingkat nasional.

Selanjutnya dari sisi pembangunan manusia, data BPS terakhir menunjukkan capaian IPM Sulbar tahun 2018 sebesar 65,10. Artinya, IPM Sulbar masih berada dalam kategori “sedang” ( $60 \leq \text{IPM} \leq 70$ ). Walaupun IPM Sulbar mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sebesar 1,24 persen (yoy), akan tetapi angka tersebut belum mencapai target RPJMD Sulbar tahun 2018 sebesar 66,62 dan masih terpaut jauh dibawah capaian rata-rata provinsi lain di Indonesia yang sebesar 71,39.



Sumber: BPS Sulbar dan Nasional, 2017-2019 (diolah)

Dilihat dari perbandingan antar kabupaten, Mamuju sebagai ibukota provinsi mencatatkan IPM tertinggi. Namun dari sisi pertumbuhan, Pasangkayu dan Polewali Mandar menunjukkan pertumbuhan IPM tertinggi masing-masing sebesar 1,42 persen dan 1,27 persen, yang secara khusus didorong oleh kenaikan pada komponen pengetahuan dan ekonomi. Kenaikan pada aspek pengetahuan yang tampak pada angka Rata-rata Lama Sekolah seiring dengan kebijakan ekspansi belanja secara signifikan pada fungsi Pendidikan. Ke depan, selain pada aspek pendidikan, upaya pemda Sulbar dalam mencapai target IPM tahun 2019 sebesar 67,64 juga perlu diarahkan pada ekspansi yang disertai dengan efektivitas dan efisiensi belanja fungsi kesehatan, guna mendorong laju IPM dari komponen peningkatan Umur Harapan Hidup.

Dilihat dari perbandingan antar kabupaten, Mamuju sebagai ibukota provinsi mencatatkan IPM tertinggi. Namun dari sisi pertumbuhan, Pasangkayu dan Polewali Mandar menunjukkan pertumbuhan IPM tertinggi.

BAB  
2

## PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Sulbar s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2018 dan 2019  
(dalam Rp miliar)

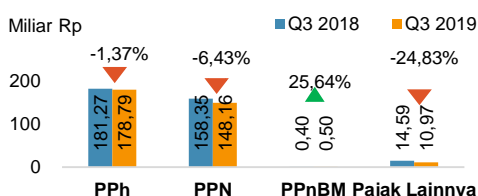
URAIAN	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>775,01</b>	<b>398,63</b>	<b>51,44%</b>	<b>812,59</b>	<b>394,76</b>	<b>48,58%</b>
I. Penerimaan Dalam Negeri	775,01	398,63	51,44%	812,59	394,76	48,58%
1. Penerimaan Pajak	745,26	354,60	47,58%	776,74	338,42	43,57%
2. PNBP	29,75	44,03	148,00%	35,85	56,34	157,15%
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>10.275,61</b>	<b>7.218,67</b>	<b>70,25%</b>	<b>10.979,64</b>	<b>7.661,34</b>	<b>69,78%</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.653,31	2.045,52	55,99%	3.764,42	2.248,63	59,73%
1. Belanja Pegawai	1.064,09	717,50	67,43%	1.033,42	771,68	74,67%
2. Belanja Barang	1.494,29	860,79	57,61%	1.493,93	901,83	60,37%
3. Belanja Modal	1.087,18	463,93	42,67%	1.231,28	572,58	46,50%
4. Belanja Bantuan Sosial	7,75	3,31	42,68%	5,78	2,54	43,97%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	6.622,30	5.173,15	78,12%	7.215,22	5.412,71	75,02%
1. Transfer ke Daerah	6.150,42	4.890,02	79,51%	6.654,99	5.076,57	76,28%
a. Dana Perimbangan	5.959,92	4.699,52	78,85%	6.486,83	4.920,72	75,86%
1) DAU	4.224,89	3.488,26	82,56%	4.399,27	3.670,56	83,44%
2) DBH	100,38	65,32	65,07%	91,77	64,83	70,65%
3) DAK	1.634,65	1.145,94	70,10%	1.995,79	1.185,32	59,39%
a) DAK Fisik	841,59	587,41	69,80%	1.086,71	449,17	41,33%
b) DAK Non Fisik	793,07	558,53	70,43%	909,08	736,15	80,98%
b. Dana Non Perimbangan	190,50	190,50	100,00%	168,16	155,86	92,68%
2. Dana Desa	471,88	283,13	60,00%	560,23	336,14	60,00%
<b>C. SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(9.500,60)</b>	<b>(6.820,04)</b>		<b>(10.167,05)</b>	<b>(7.266,58)</b>	

Sumber: OMSPAN, Monev PA, SIMTRADA; KPP Pratama Mamuju; KPP Pratama Majene (diolah)

## 2.1 Pendapatan Negara

## 2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan Pajak s.d. Triwulan III 2019 per Jenis Pajak



Sumber: OMSPAN (diolah)

Sampai dengan triwulan III 2019, penerimaan perpajakan di Sulbar terealisasi sebesar 43,57 persen dari target. Realisasi ini menurun sebesar 4,56 persen (yoy). Hal tersebut salah satunya dipicu oleh pelemahan capaian realisasi penerimaan PPh, PPN, dan Pajak Lainnya dibandingkan tahun 2018.

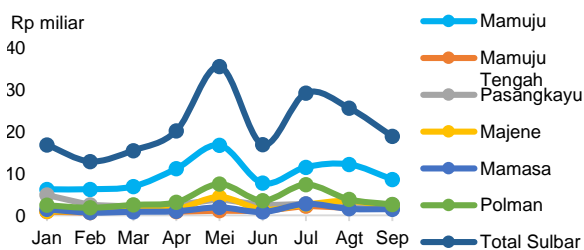


Sampai dengan triwulan III 2019, pendapatan APBN terealisasi sebesar Rp394,76 miliar atau 48,58 persen dari target.

## 2.1.1.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh pada triwulan III 2019 di Sulbar mencapai Rp178,79 miliar. Angka ini lebih rendah 1,37 persen (yoy) antara lain disebabkan oleh wajib pajak yang belum melunasi utang pajak dan belum menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Realisasi kinerja PPh tertinggi berada di Mamuju

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPh lingkup Sulbar Triwulan III 2019



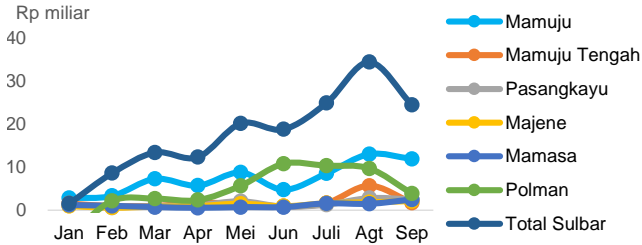
Sumber: OMSPAN (diolah)

sebesar Rp87,10 miliar sedangkan realisasi terendah berada di Mamuju Tengah sebesar Rp12,18 miliar.

**2.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

**Kontributor tertinggi penerimaan PPN s.d. triwulan III 2019 berasal dari Mamuju yakni sebesar Rp65,98 miliar.**

Grafik 2.3 Realisasi Penerimaan PPN lingkup Sulbar Triwulan III 2019



Sumber: OMSPAN (diolah)

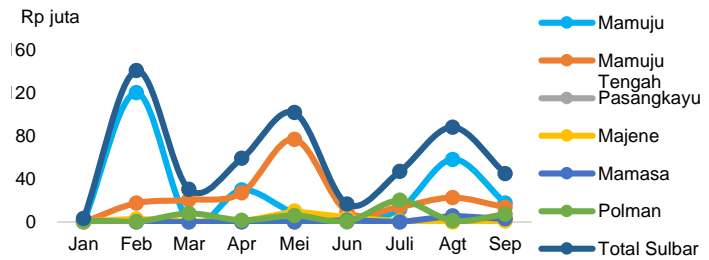
Tren penerimaan PPN di Sulbar pada triwulan III 2019 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, salah satunya dipicu keterlambatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik. Penerimaan PPN triwulan III 2019 mencapai Rp148,16 miliar dimana

kontribusi tertinggi berasal dari Mamuju dengan sumbangan sebesar Rp65,98 miliar. Sedangkan penerimaan terendah di Mamasa sebesar Rp10,12 miliar.

**2.1.1.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Rendahnya hasil penjualan barang mewah di wilayah Sulbar mengakibatkan rendahnya PPnBM yang diterima. Dibandingkan dengan penerimaan dari PPh dan PPN maka penerimaan PPnBM jauh lebih kecil. Sampai dengan triwulan III 2019 penerimaan

Grafik 2.4 Realisasi Penerimaan PPnBM lingkup Sulbar Triwulan III 2019

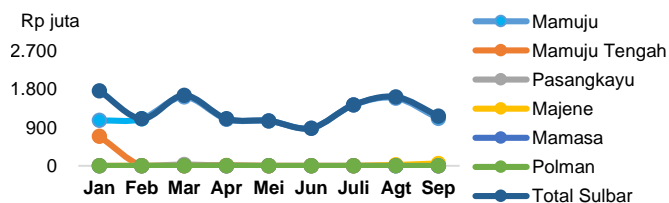


Sumber: OMSPAN (diolah)

PPnBM hanya mencapai Rp497,41 juta atau 0,15 persen dari total penerimaan pajak di Sulbar. Namun capaian dimaksud lebih tinggi 25,64 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

**2.1.1.4 Pajak Lainnya**

Grafik 2.5 Realisasi Penerimaan Pajak Lainnya lingkup Sulbar Triwulan III 2019



Sumber: OMSPAN (diolah)

Penerimaan dari pajak lainnya pada triwulan III 2019 mencapai Rp10,97 miliar. Penerimaan ini berasal dari PBB dan beberapa jenis pajak lainnya di luar PPh, PPN dan PPnBM. Dibandingkan dengan

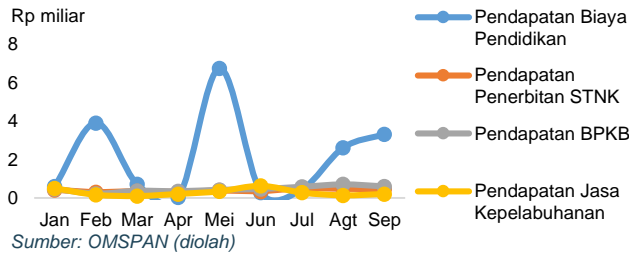
tahun sebelumnya, penerimaan pajak lainnya menurun sebesar Rp3,62 miliar atau 24,83 persen (yoy).

**2.1.1.5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Sampai dengan triwulan III 2019, penerimaan PNBP di wilayah Sulbar mencapai 56,34 miliar atau 157,15 persen dari pagu. Realisasi penerimaan PNBP lingkup Sulbar tumbuh sebesar Rp12,31 miliar atau 27,96 persen (yoy) yang didominasi oleh penerimaan dari Pendapatan Biaya Pendidikan.

**Realisasi PNBP pemerintah pusat Rp56,34 miliar, sebagian besar berasal dari Pendapatan Biaya Pendidikan.**

Grafik 2.6 Realisasi Empat Jenis PNBP Terbesar di Sulbar s.d. Triwulan III 2019



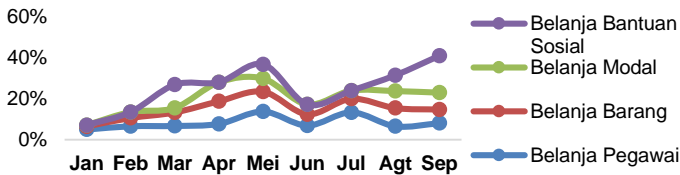
Kontributor dominan lainnya adalah Penerimaan BPKB, Pendapatan Penerbitan STNK, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan masing-masing dengan realisasi sebesar Rp4,25 miliar, Rp3,63 miliar, dan Rp2,62 miliar.

Meskipun realisasi penerimaan PNBP secara nasional melambat sampai dengan Agustus 2019, namun di Sulbar capaian realisasi penerimaan PNBP telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian seharusnya target penerimaan dari PNBP tersebut dapat ditinjau ulang untuk dilakukan penyesuaian target.

**2.2 Belanja Negara**

**2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat**

Grafik 2.7 Tren Persentase Realisasi Belanja per Jenis Belanja Lingkup Sulbar Triwulan III 2019



Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan III 2019 sebesar Rp2.248,63 miliar atau 59,73 persen dari total pagu sebesar Rp3.764,42 miliar.

**Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.248,63 miliar atau secara nominal tumbuh sebesar 9,93% (yoy).**

Realisasi Belanja Pegawai terbesar berada pada Satker Korem 142/Taroda Tarogau Dam XIV/Hasanuddin yaitu sebesar Rp169,81 miliar. Realisasi Belanja Barang terbesar pada Satker SNVT Penyediaan Air Provinsi Sulbar sebesar Rp83,94 miliar. Sementara realisasi Belanja Modal terbesar pada Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Kaluku-Karama dan WS Palu-Lariang Provinsi Sulbar yaitu sebesar Rp145,18 miliar.

Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2,54 miliar, lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada triwulan III 2019 disebabkan karena sebagian

besar pengadaan barang dan jasa melalui Belanja Barang dan Belanja Modal telah direalisasikan pembayarannya. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya realisasi belanja pemerintah pusat pada Triwulan III 2019 lebih besar 9,93 persen atau sekitar Rp203,10 miliar.

## 2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,95 persen dari tahun sebelumnya. Dilihat dari jenis transfer, alokasi DAK Fisik di Sulbar mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 29,13 persen (yoy). Sementara itu, pagu DBH dan Dana Non Perimbangan menurun masing-masing sebesar -8,67 persen (yoy) dan -11,73 persen (yoy).

Grafik 2.8 Tren Persentase Realisasi TKDD Lingkup Sulbar Triwulan III 2019



Realisasi dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DBH, dan DAK sampai dengan triwulan III tahun 2019 adalah sebesar Rp4.920,72 miliar atau 75,86 persen. Sedangkan realisasi dana non perimbangan sebesar

Rp155,86 miliar atau 92,68 persen. Penyaluran Dana Desa sebesar Rp336,14 miliar atau 60 persen dari total pagu Dana Desa. Realisasi ini lebih besar 18,72 persen (yoy).

## 2.2.3 Satuan Kerja yang Berpotensi Menjadi BLU

Satker pengguna PNBPN di wilayah Sulbar yang berpotensi menjadi satker BLU adalah Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dan Poltekkes Mamuju. Dilihat dari perkembangan nilai aset hingga periode triwulan III 2019, Poltekkes Mamuju mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan adanya penambahan sarana prasarana berupa pembangunan gedung perkuliahan. Namun apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PNBPN, Poltekkes Mamuju mengalami penurunan yang cukup dalam yaitu 26,35 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada Poltekkes Mamuju.

Tabel 2.2 Perkembangan Aset dan Realisasi PNBPN Satker pengguna PNBPN periode Triwulan III tahun 2018 – 2019 (dalam juta Rp.)

Nama Satker	Aset			PNBPN		
	Tw III 2018	Tw III 2019	Pertumbuhan	Tw III 2018	Tw III 2019	Pertumbuhan
Unsulbar	133.125,19	135.576,40	1,84%	14.994,63	15.434,80	2,94%
Poltekkes Mamuju	75.898,83	89.193,34	17,51%	2.723,43	2.005,05	-26,35%

Sumber: Monev PA (diakses 06 November 2019); Laporan BMN pada Neraca Satker (diolah)

Sampai dengan akhir triwulan III 2019, pagu TKDD Rp7.215,12 miliar telah terealisasi sebesar 75,02%.

Unsulbar dan Poltekkes Mamuju berpotensi menjadi Satker BLU.



Dari sisi realisasi penerimaan PNPB pada triwulan III 2019, penerimaan PNPB Unsulbar tumbuh 2,94 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara dari perkembangan jumlah aset yang dimiliki, aset Unsulbar tumbuh 1,84 persen atau senilai Rp2.451,21 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Seperti halnya Poltekkes Mamuju, pertumbuhan terjadi karena Unsulbar saat ini sedang melakukan penambahan sarana dan prasarana kampus berupa pembangunan gedung perkuliahan. Dapat disimpulkan bahwa kedua satker yang berpotensi menjadi satker BLU pada sektor pendidikan tersebut saat ini tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan penambahan sarana prasarana perkuliahan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

## 2.2.4 Manajemen Investasi Pusat

### 2.2.4.1 Penerusan Pinjaman

Sampai dengan periode triwulan III tahun anggaran 2019 tidak terdapat penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*) di wilayah Provinsi Sulbar.

### 2.2.4.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tabel 2.3 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Lingkup Sulbar Triwulan III Tahun 2018-2019

Kabupaten	2018		2019		% Perubahan	
	Debitur	Penyaluran (Rp miliar)	Debitur	Penyaluran (Rp miliar)	Debitur	Penyaluran
Majene	3.566	60,51	4.027	68,98	12,93%	14,00%
Mamasa	1.843	39,36	2.442	52,81	32,50%	34,17%
Mamuju	6.193	186,31	7.178	224,09	15,91%	20,28%
Mamuju Tengah	131	14,66	102	26,07	-22,14%	77,83%
Pasangkayu	4.339	213,62	4.059	199,77	-6,45%	-6,48%
Polewali Mandar	7.598	191,72	8.356	238,54	9,98%	24,42%
<b>Total</b>	<b>23.670</b>	<b>706,18</b>	<b>26.164</b>	<b>810,26</b>	<b>10,54%</b>	<b>14,74%</b>

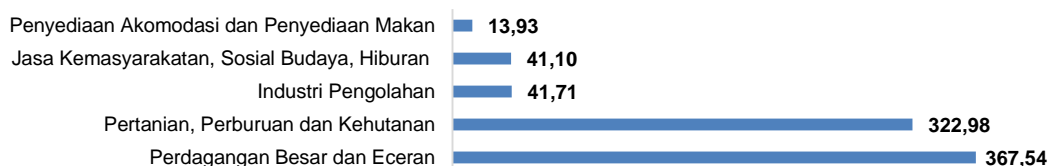
Sumber: SIKP (diakses, diolah pada tanggal 06 November 2019)

Sampai dengan triwulan III 2019, realisasi penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp238,54 miliar dengan total 8.356 debitur. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Mamuju dan Pasangkayu. Total realisasi penyaluran KUR sampai dengan triwulan III 2019 sebesar Rp810,26 miliar yang disalurkan kepada 26.164 debitur. Sementara itu, sektor ekonomi dengan penyaluran KUR terbesar sampai dengan triwulan III 2019 adalah sebagai berikut:



Realisasi KUR sampai dengan triwulan III 2019 mencapai Rp810,26 miliar dan UMi sebesar Rp3,92 miliar.

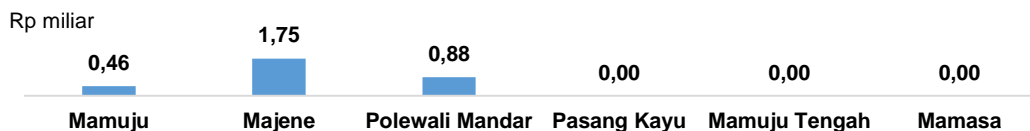
Grafik 2.9 Lima Besar Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi di Sulbar Triwulan III Tahun 2019



Sumber: SIKP (diolah, diakses pada tanggal 06 November 2019)

Selain program KUR, terdapat pula sumber pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang telah terealisasi sebesar Rp3,92 miliar dengan total debitur sebanyak 1.023 orang. Penyaluran UMi terbesar berada di Kabupaten Majene yakni sebesar Rp1,75 miliar.

Grafik 2.10 Penyaluran Pembiayaan UMi per Wilayah di Sulbar Triwulan III Tahun 2019



Sumber: SIKP UMi (diolah, diakses pada tanggal 06 November 2019)

## 2.3 Prognosis Realisasi APBN

Tabel 2.4 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Sulbar s.d. Triwulan IV 2019 (dalam Rp miliar)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan III		Perkiraan s.d. Triwulan IV	
		Rp.	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp.	% Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	812,59	394,76	48,58%	664,39	81,76%
Belanja Negara	10.979,64	7.661,34	69,78%	10.726,15	97,69%
Surplus/Defisit	(10.167,05)	(7.266,58)		(10.027,24)	

Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

Keterangan: (\*) dihitung berdasarkan rata-rata tren realisasi dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan tren realisasi dalam dua tahun terakhir, realisasi Pendapatan Negara lingkup Sulbar pada akhir tahun 2019 diproyeksikan akan terealisasi 81,76 persen dari target. Hal ini menandakan adanya potensi penurunan kinerja realisasi pendapatan pada akhir 2019 sebesar 6,93 persen dibandingkan dengan realisasi pada akhir tahun sebelumnya. Potensi tersebut berkorelasi dengan melemahnya kinerja realisasi pendapatan negara sampai dengan triwulan III 2019 sebesar 5,55 persen (yoy).

Peningkatan kinerja penyerapan PNPB sampai dengan triwulan III 2019 sebesar 6,15 persen (yoy) tidak dibarengi dengan realisasi penerimaan pajak yang justru berkontraksi sebesar 4,01 persen (yoy). Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah dengan cara mengoptimalkan realisasi PPN sampai dengan akhir tahun ini. Harapannya, realisasi penerimaan PPN di Sulbar dapat terkerek sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Belanja Modal dan DAK Fisik yang pagunya baru terserap masing-masing sebesar 46,50 persen dan 41,33 persen di akhir triwulan III 2019.

Di sisi lain, realisasi Belanja Negara di Sulbar pada akhir triwulan IV 2019 diprediksi akan mencapai 97,69 persen dari total pagu belanja atau meningkat tipis sebesar 0,04 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan capaian penyerapan Belanja Modal sampai dengan triwulan III sebesar 8,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 perlu dipertahankan sampai akhir tahun. Di sisi lain, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sebab tingkat realisasinya mengalami penurunan dari 69,80 persen pada triwulan III 2018 menjadi sebesar 41,33 persen di akhir triwulan III 2019.

Kinerja Pendapatan APBN pada akhir tahun 2019 diproyeksi mencapai 81,76% dari target, sementara Belanja APBN diperkirakan terserap 97,69% dari pagu

## PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulbar s.d. Triwulan III 2018 dan 2019 (dalam juta Rupiah)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Realisasi s.d. Tw III	%	Pagu	Realisasi s.d. Tw III	%
<b>PENDAPATAN</b>						
<b>PAD</b>	<b>858.145</b>	<b>414.546</b>	<b>48,31%</b>	<b>821.889</b>	<b>464.654</b>	<b>56,53%</b>
Pajak Daerah	359.877	231.417	64,30%	381.557	252.236	66,11%
Retribusi Daerah	101.146	45.012	44,50%	130.445	53.076	40,69%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	27.586	22.882	82,95%	36.453	26.282	72,10%
Lain-Lain PAD yang Sah	369.536	115.235	31,18%	273.434	133.060	48,66%
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>6.796.894</b>	<b>5.216.803</b>	<b>76,75%</b>	<b>7.360.988</b>	<b>5.444.562</b>	<b>73,97%</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>5.981.838</b>	<b>4.653.631</b>	<b>77,80%</b>	<b>6.486.529</b>	<b>4.872.667</b>	<b>75,12%</b>
Dana Bagi Hasil	100.380	63.194	62,96%	91.673	64.834	70,72%
Dana Alokasi Umum	4.224.888	3.448.003	81,61%	4.399.268	3.623.677	82,37%
Dana Alokasi Khusus Fisik	839.034	586.876	69,95%	1.086.709	449.168	41,33%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	817.536	555.558	67,96%	908.879	734.988	80,87%
<b>Non Dana Perimbangan</b>	<b>190.301</b>	<b>172.500</b>	<b>90,65%</b>	<b>168.162</b>	<b>155.860</b>	<b>92,68%</b>
Transfer Dana Lainnya	190.301	172.500	90,65%	168.162	155.860	92,68%
<b>Transfer Pemerintah Daerah</b>	<b>151.984</b>	<b>107.545</b>	<b>70,76%</b>	<b>146.071</b>	<b>79.900</b>	<b>54,70%</b>
Bagi Hasil Pajak	138.534	94.070	67,90%	146.071	72.150	49,39%
Transfer Lainnya	13.450	13.475	100,19%	-	7.750	-
<b>Dana Desa</b>	<b>472.772</b>	<b>283.127</b>	<b>59,89%</b>	<b>560.227</b>	<b>336.136</b>	<b>60,00%</b>
<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>58.796</b>	<b>1.203</b>	<b>2,05%</b>	<b>140.850</b>	<b>1.448</b>	<b>1,03%</b>
Pendapatan Hibah	13.200	243	1,84%	139.650	254	0,18%
Pendapatan Lainnya	45.596	960	2,11%	1.200	1.194	99,51%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.713.835</b>	<b>5.632.552</b>	<b>73,02%</b>	<b>8.323.727</b>	<b>5.910.664</b>	<b>71,01%</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.012.449</b>	<b>3.986.973</b>	<b>56,86%</b>	<b>7.278.938</b>	<b>3.939.966</b>	<b>54,13%</b>
Belanja Pegawai	2.707.314	1.901.096	70,22%	3.015.980	2.034.893	67,47%
Belanja Barang	1.965.608	930.920	47,36%	2.024.359	979.284	48,38%
Belanja Bunga	28.333	13.589	47,96%	21.958	15.895	72,39%
Belanja Hibah	396.762	276.630	69,72%	344.278	218.747	54,13%
Belanja Bantuan Sosial	32.725	23.322	71,27%	33.686	26.239	77,89%
Belanja Modal	1.868.686	840.545	44,98%	1.814.775	662.904	36,53%
Belanja Tidak Terduga	13.021	872	6,69%	23.903	2.004	8,38%
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>932.179</b>	<b>574.343</b>	<b>61,61%</b>	<b>1.133.765</b>	<b>627.108</b>	<b>55,31%</b>
Transfer Dana Desa	472.268	276.567	58,56%	560.227	227.210	40,56%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda/Desa	265.688	169.142	63,66%	344.488	309.836	89,94%
Transfer Bagi Hasil Pajak	147.764	107.941	73,05%	153.971	77.315	50,21%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	46.459	20.692	44,54%	75.079	12.748	16,98%
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>7.944.628</b>	<b>4.561.316</b>	<b>57,41%</b>	<b>8.412.703</b>	<b>4.567.074</b>	<b>54,29%</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(230.793)</b>	<b>1.071.235</b>		<b>(88.976)</b>	<b>1.343.590</b>	

Sumber: BPKAD lingkup Sulbar, <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id> (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan APBD Sulbar secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar Rp278,11 miliar atau 4,94 persen (yoy). Rasio efektivitas PAD mengalami kenaikan 8,23 persen (yoy) yang didorong oleh kontribusi penerimaan pajak daerah sebesar 54,28 persen dari total realisasi PAD. Pendapatan pajak rokok dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor mengakselerasi kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan efektivitas PAD pada triwulan III tahun 2019. Namun demikian rasio kemandirian daerah masih sangat rendah yaitu sekitar 8,53 persen. Pengembangan potensi pengelolaan sektor UMKM yang dilakukan oleh pemda diharapkan mampu mengakselerasi PAD untuk menguatkan kemandirian daerah.

Realisasi belanja APBD Sulbar mencapai 54,29 persen atau turun 3,31 persen dari persentase realisasi periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh turunnya realisasi belanja modal hingga Rp177,64 miliar atau 21,13



Pendapatan Daerah naik sebesar 4,94% (yoy). Sedangkan, Belanja Daerah turun 3,31% (yoy).

persen (*yoy*). Meskipun ada peningkatan realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun rasio Belanja Modal yang mencapai 14,51 persen, nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio realisasi Belanja Pegawai 44,56 persen dan Belanja Barang 21,44 persen terhadap total realisasi belanja. Pemda perlu mendorong OPD agar segera mempercepat penyaluran DAK Fisik untuk meningkatkan realisasi belanja.

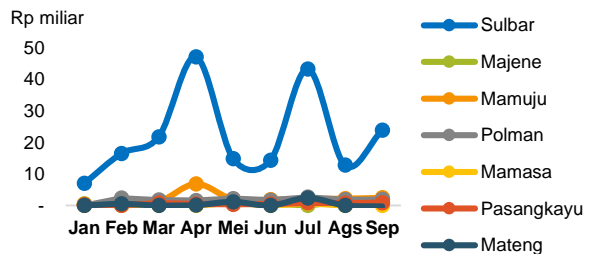
### 3.1 Pendapatan Daerah

#### 3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

##### 3.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp2,93 miliar atau tiga persen (*q to q*). Pada Juli 2019, penerimaan jenis pajak yang dipungut oleh pemprov mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp28,99 miliar atau 202,82 persen (*m to m*). Hal tersebut didorong oleh realisasi Pajak Rokok sebesar Rp25,88 miliar atau 59,80 persen dari realisasi pajak pemprov.

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lingkup Sulbar Triwulan III 2019



Sumber: BPKAD, SIKD DJPK (diolah)

Secara *q to q*, Realisasi Pajak Daerah sampai dengan triwulan III meningkat 3% dan Realisasi Retribusi Daerah naik 85,01%

Sementara itu, untuk jenis pajak kabupaten realisasi tertinggi berasal dari Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi mencapai Rp10,71 miliar atau berkontribusi 52,53 persen dari total realisasi sebesar Rp20,39 miliar.

##### 3.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Lingkup Sulbar Triwulan III 2019



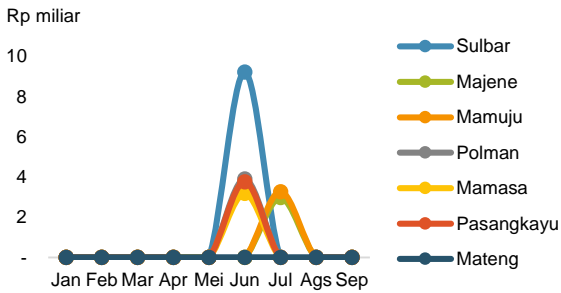
Sumber: BPKAD, SIKD DJPK (diolah)

Realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp3,09 miliar atau 15,71 persen (*q to q*). Peningkatan retribusi penerimaan daerah terjadi karena sudah mulai ada penerimaan retribusi daerah dari Kabupaten Mamuju Tengah

sebesar Rp5,05 miliar di bulan Juli, dari bulan sebelumnya yang nihil. Proporsi terbesar dari retribusi di Kabupaten Mamuju Tengah pada bulan Juli berasal dari sektor pelayanan kesehatan sebesar Rp4,94 miliar atau 97,86 persen.

### 3.1.1.3 Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HKDYD)

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan HKDYD Sulbar Triwulan III 2019

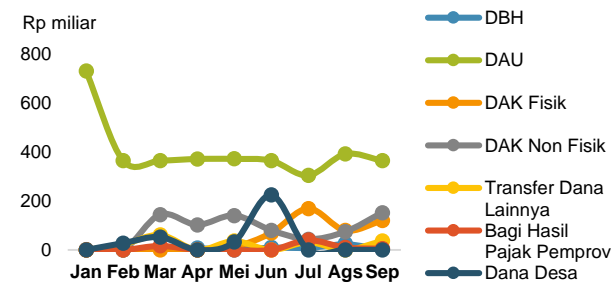


Sumber: BPKAD, SIKD DJPK (diolah)

Total realisasi HKYD di Sulbar sampai dengan triwulan III tahun 2019 mencapai Rp26,28 miliar atau 72,10 persen dari target penerimaan. Pemprov Sulbar memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan di lingkup Sulbar yaitu sebesar Rp9,22 miliar atau 35,06 persen.

### 3.1.2 Pendapatan Transfer

Grafik 3.4 Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Sulbar Triwulan III 2019



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

Realisasi DAU mendominasi 66,27 persen dari total Pendapatan Transfer. Sampai dengan triwulan III 2019 penyaluran DAK Fisik sebesar Rp449,17 miliar atau sebesar 41,33 persen dari pagu DIPA.

DAK Fisik dan Dana Desa Tahap II di wilayah Sulbar telah tersalurkan seluruhnya.

Sampai dengan 8 November 2019 penyaluran DAK Fisik di Sulbar mencapai Rp691,64 miliar atau 63,65 persen dari pagu DIPA. Penyaluran DAK Fisik Tahap II telah selesai dilaksanakan dengan realisasi masing-masing bidang mencapai 70 persen. Namun untuk penyaluran DAK Fisik Tahap III baru dilakukan oleh Kabupaten Mamuju pada DAK Fisik Reguler bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp402,89 juta.

Kemudian realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN-RKUD tahap II tahun 2019 sudah tersalur 100 persen yaitu sebesar Rp224,09 miliar. Kemudian penyaluran Dana Desa dari RKUD-RKD tahap II 2019 sudah mencapai 99,27 persen atau sebesar Rp222,45 miliar. Namun penyaluran Dana Desa dari RKUN-RKUD tahap III tahun 2019 sebesar Rp83,58 miliar atau 37,30 persen. Dana Desa tersebut belum disalurkan dari RKUD-RKD.

Kabupaten yang telah menyalurkan Dana Desa tahap III dari RKUN-RKUD yaitu Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp2,56 miliar atau 3,96 persen, Kabupaten Mamasa Rp57,6 miliar atau 100 persen, dan Kabupaten Mamuju Utara Rp23,36 miliar atau 100 persen. Koordinasi perlu dilakukan antara OPD, BPKAD, dan Pemda dalam

rangka pemenuhan persyaratan dokumen DAK Fisik dan Dana Desa Tahap III agar dapat dipenuhi sebelum tanggal 16 Desember 2019.

### 3.1.3 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan triwulan III 2019 sebesar Rp133,06 miliar. Kontribusi tertinggi berasal dari pendapatan BLUD sebesar Rp74,79 miliar atau 56,21 persen dari total penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kemudian pendapatan yang berasal dari dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp21,21 miliar atau sebesar 15,94 persen.

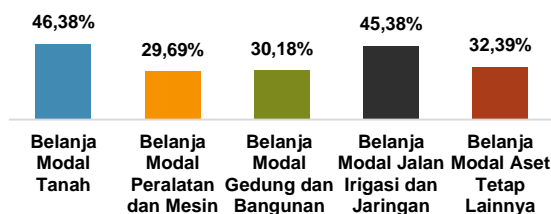
## 3.2 Belanja Daerah

### 3.2.1 Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Sampai dengan triwulan III 2019 realisasi belanja APBD di Sulbar mencapai Rp4,57 triliun atau 54,29 persen dari pagu. Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemda dengan realisasi belanja tertinggi sebesar Rp444,34 miliar atau 59,85 persen. Sedangkan Pemprov Sulbar menjadi pemda dengan realisasi belanja terendah sebesar Rp1,02 triliun atau 49,15 persen dari pagu belanja.

Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp133,80 miliar atau 7,04 persen (yoy) dan Belanja Barang/Jasa naik Rp43,36 miliar atau 5,20 persen (yoy). Sedangkan realisasi Belanja Modal menurun sebesar Rp177,46 miliar atau 21,13 persen (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp1,54 triliun atau sebesar 75,77 persen dari total belanja pegawai.

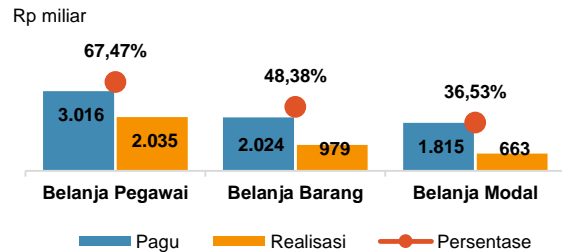
Grafik 3.6 Realisasi per Jenis Belanja Modal Lingkup Sulbar s.d.Triwulan III 2019



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)


serapan komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin yakni baru 29,69 persen dari total pagu.

Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Lingkup Sulbar s.d.Triwulan III 2019



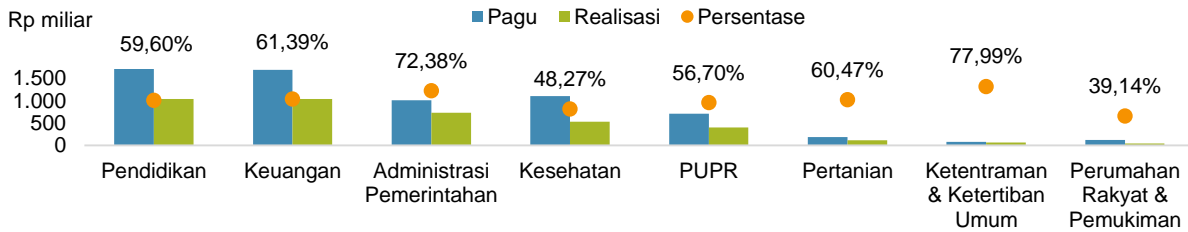
Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

Kemudian kenaikan realisasi Belanja Barang/Jasa didorong oleh belanja perjalanan dinas Rp242,39 miliar, belanja jasa kantor sebesar Rp172,01 miliar, dan belanja bahan makanan dan minuman sebesar Rp97,28 miliar. Sedangkan penurunan realiasi Belanja Modal terjadi karena rendahnya

 Realiasi Belanja Pegawai APBD mengalami kenaikan sebesar 7,04% (yoy). Sedangkan realisasi Belanja Modal menurun 21,13% (yoy).

### 3.2.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik 3.7 Delapan Besar Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Urusan Lingkup Sulbar s.d. Triwulan III 2019

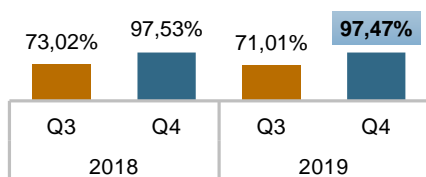


Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

Dari delapan alokasi belanja terbesar berdasarkan klasifikasi urusan, realisasi belanja tertinggi terdapat pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp64,47 miliar atau 77,99 persen dari pagu belanja. Kontribusi belanja terbesar dari klasifikasi urusan tersebut yaitu belanja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar 49,97 persen. Sedangkan realisasi belanja terendah terdapat pada urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman yang mencapai 39,14 persen dari pagu belanja.

### 3.3 Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Akhir Tahun 2019

Grafik 3.8 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Sulbar Tahun 2018-2019



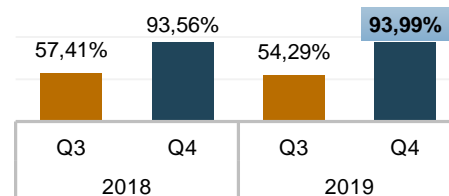
Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

Berdasarkan tren realisasi pendapatan APBD Sulbar dua tahun terakhir, diproyeksikan bahwa sampai akhir 2019 pendapatan APBD Sulbar sebesar Rp8,11 triliun atau 97,47 persen dari pagu. Berpotensi menurun sebesar 0,06 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Hal tersebut tercermin dari kinerja pendapatan sampai dengan triwulan III 2019 yang juga menurun sebesar 2,01 persen (yoy). Untuk mendorong akselerasi pendapatan, pemda lingkup Sulbar dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi realisasi pajak dan retribusi daerah.

Di sisi lain, realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan III 2019 menurun sebesar 3,12 persen (yoy). Namun demikian belanja APBD Sulbar sampai akhir tahun diproyeksikan mengalami kenaikan tipis sebesar 0,43 persen dibandingkan dengan tahun lalu berdasarkan tren dua tahun sebelumnya.

Grafik 3.9 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Sulbar Tahun 2018-2019



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)



Sampai dengan akhir triwulan III, kinerja realisasi belanja pada urusan Kesehatan belum melampaui separuh dari pagu belanja.



Pada akhir tahun 2019, kinerja Pendapatan Daerah Sulbar diproyeksikan mencapai 97,47% dari target dan Belanja Daerah diperkirakan terserap 93,99% dari pagu

Prognosis pertumbuhan realisasi belanja APBD lingkup Sulbar tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan rasio belanja pegawai dan belanja barang jasa yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,04 persen dan 5,20 persen (*yoy*). Selain itu, Gubernur Sulbar telah menginstruksikan agar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan perjalanan dinas dan fokus menggenjot serapan anggaran di periode akhir tahun anggaran ini<sup>1</sup>. Hal ini diharapkan dapat mengakselerasi realisasi anggaran belanja APBD di akhir triwulan IV 2019.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Sulbar s.d. Triwulan IV 2019 (dalam Juta Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d.Triwulan III		Perkiraan Realisasi s.d.Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	8.323.727	5.910.664	71,01%	8.113.314	97,47%
Belanja Daerah	8.412.703	4.567.074	54,29%	7.906.987	93,99%
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(88.976)</b>	<b>1.343.590</b>		<b>206.327</b>	

Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD lingkup Sulbar, Kanwil DJPB Prov. Sulbar (diolah)

<sup>1</sup> Radar Sulbar, *Realisasi Masih 65 Persen*, 5 November 2019, hlm. 1



BAB  
4

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulbar s.d. Triwulan III Tahun 2019 (dalam Rp. miliar)

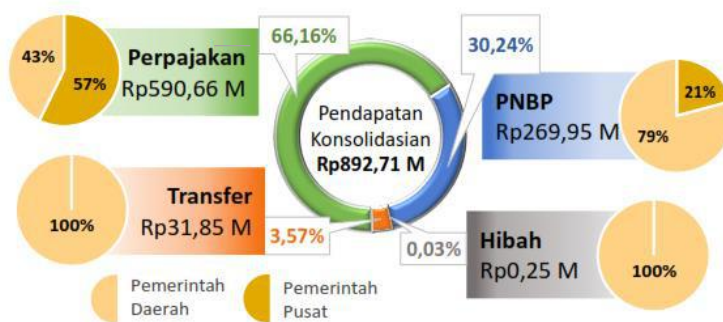
Uraian	Triwulan III 2019				Triwulan III 2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>394,76</b>	<b>5.910,66</b>	<b>892,71</b>	<b>4,04%</b>	<b>858,03</b>
Pendapatan Perpajakan	338,42	252,24	590,66	0,79%	586,01
Pendapatan Bukan Pajak	56,34	213,61	269,95	18,34%	228,12
Hibah	0,00	0,25	0,25	4,53%	0,24
Transfer*	0,00	5.444,56	31,85	(27,03%)	43,65
<b>Belanja Negara</b>	<b>7.661,37</b>	<b>4.567,07</b>	<b>6.815,74</b>	<b>3,16%</b>	<b>6.606,85</b>
Belanja Pemerintah	2.248,66	3.939,97	6.188,63	2,59%	6.032,50
Transfer*	5.412,71	627,11	627,11	9,19%	574,34
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(7.266,61)</b>	<b>1.343,59</b>	<b>(5.923,02)</b>	<b>3,03%</b>	<b>(5.748,82)</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>(107,29%)</b>	<b>(13,22)</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	49,21	49,21	471,52%	8,61
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	48,25	48,25	121,04%	21,83
<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran</b>	<b>(7.266,61)</b>	<b>1.344,55</b>	<b>(5.922,06)</b>	<b>2,78%</b>	<b>(5.762,03)</b>

Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar; OMSPAN; SIKD, 2018-2019 (diolah)  
Keterangan: \*) Seluruh Belanja Transfer Pempus dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemda.

4.2 Pendapatan Konsolidasian

4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.1 Proporsi Pendapatan Konsolidasian Sulbar Triwulan III Tahun 2019



Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2019 (diolah)

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Sulbar sampai dengan triwulan III 2019 sebesar Rp892,71 miliar didominasi oleh Pendapatan Perpajakan. Pemerintah Pusat menyumbang pendapatan perpajakan yang lebih besar, yakni Rp338,42 miliar. Dari jumlah tersebut, 53 persen di antaranya berasal dari realisasi PPh Rp179 miliar. Sedangkan realisasi PPN menyumbang 44 persen atau sebesar Rp148 miliar dari total pendapatan perpajakan pemerintah pusat.

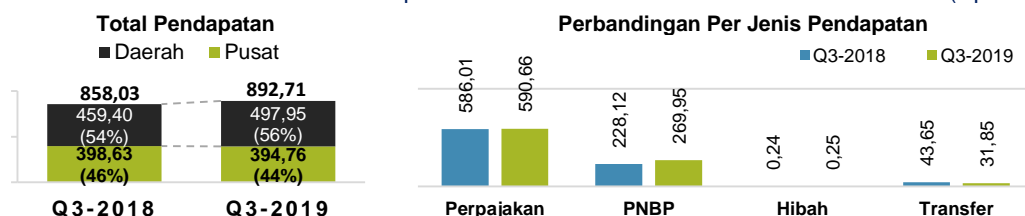


Realisasi Pendapatan APBN dan APBD sebesar Rp892,71 miliar sebagian besar berasal dari pendapatan pemerintah pusat.

Sebaliknya, pada Pendapatan Bukan Pajak, realisasi pendapatan dari pemerintah daerah lebih dominan. Terdapat dua jenis pendapatan yang memberi andil besar terhadap realisasi Pendapatan Bukan Pajak pemda, yakni Lain-lain PAD yang Sah dan Retribusi Daerah masing-masing senilai Rp133 miliar dan Rp53 miliar. Di sisi lain, jumlah realisasi pendapatan transfer pemda yang diterima dari pemerintah pusat mencapai Rp5,4 triliun, dimana 67 persen di antaranya berupa realisasi DAU. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal pemda Sulbar terhadap pemerintah pusat, walaupun setelah dieliminasi dengan akun resiprokal, tercatat penerimaan transfer pemda adalah sebesar Rp31,85 miliar.

### 4.2.2 Analisis Perubahan

Grafik 4.2 Perubahan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Sulbar Triwulan III 2018-2019 (Rp miliar)



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, 2018-2019 (diolah)

Realisasi Pendapatan Konsolidasian tumbuh 4,04% (yoy), sehubungan dengan menguatnya pendapatan pemerintah daerah.

Secara agregat, realisasi pendapatan konsolidasian Sulbar tumbuh 4,04 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dominasi pendapatan pemerintah daerah tampak menguat seiring dengan terjadinya penurunan pada sisi pendapatan pemerintah pusat. Jika dilihat dari jenis pendapatan, semua jenis pendapatan kecuali pendapatan transfer mengalami tren positif. Pendapatan transfer konsolidasian tampak menurun, meskipun secara riil pendapatan transfer yang diterima oleh pemda Sulbar sebenarnya mengalami kenaikan. Hal ini berhubungan dengan adanya eliminasi akun resiprokal.

Kenaikan paling tinggi terjadi pada PNBP, yakni sebesar Rp41,83 miliar atau tumbuh 18,34 persen. Tren positif tersebut didorong oleh peningkatan pada PNBP pemerintah pusat sebesar Rp12,31 miliar, dan pendapatan bukan pajak dari pemda yang naik Rp29,52 miliar. Peningkatan pada PNBP pemda sebagian besar berasal dari kinerja positif pada penerimaan LLPADYS yang tumbuh Rp18 miliar (yoy). Di sisi lain, kenaikan pada Pendapatan Perpajakan pemda sebesar sembilan persen sedikit tertahan oleh realisasi pendapatan perpajakan pemerintah pusat yang pada periode ini turun hampir lima persen (yoy). Kondisi tersebut menyebabkan secara keseluruhan realisasi Pendapatan Perpajakan konsolidasian hanya tumbuh 0,79 persen.

### 4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel 4.2 Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK dengan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Sulbar Triwulan III 2018-2019 (dalam Rp miliar)

Uraian	2018		2019	
	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
Penerimaan Perpajakan	586,01	19,70%	590,66	0,79%
PNBP	228,12	0,42%	269,95	18,34%
<b>Total Pendapatan</b>	<b>814,13</b>	<b>13,59%</b>	<b>860,61</b>	<b>5,71%</b>
<b>PDRB (ADHB)/Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>31.988,00</b>	<b>6,74%</b>	<b>32.807,00</b>	<b>4,89%</b>
<b>Rasio Pajak</b>		<b>1,83%</b>		<b>1,80%</b>
<b>Rasio Pendapatan thdp PDRB</b>		<b>2,55%</b>		<b>2,62%</b>

Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Sulbar, 2018-2019 (diolah)

Pada triwulan III 2019, pelambatan ekonomi Sulbar turut berdampak pada melambatnya pertumbuhan pendapatan Sulbar. Rasio pajak sedikit turun, tiga basis poin dari 1,83 persen menjadi 1,80 persen. Penambahan aktivitas perekonomian Sulbar belum mampu diiringi oleh pertumbuhan yang sama pada sisi perpajakan. Adanya gap antara pertumbuhan ekonomi 4,89 persen dan pertumbuhan Penerimaan Perpajakan 0,79 persen mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi penerimaan yang belum dioptimalkan oleh pemerintah. Sedangkan secara keseluruhan, rasio pendapatan terhadap PDRB meningkat sehubungan dengan pertumbuhan pada PNBP.

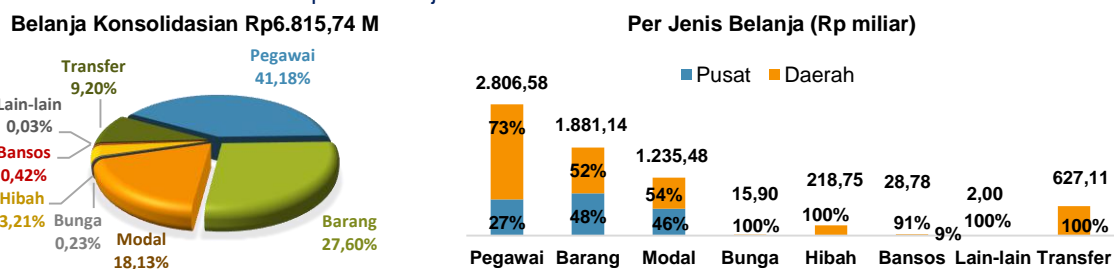


Melambatnya pertumbuhan ekonomi telah berkontribusi terhadap pelemahan laju pertumbuhan Pendapatan Perpajakan.

### 4.3 Belanja Konsolidasian

#### 4.3.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.3 Proporsi Belanja Konsolidasian Sulawesi Barat Triwulan III 2019



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; OMSPAN, SIKD, 2019 (diolah)

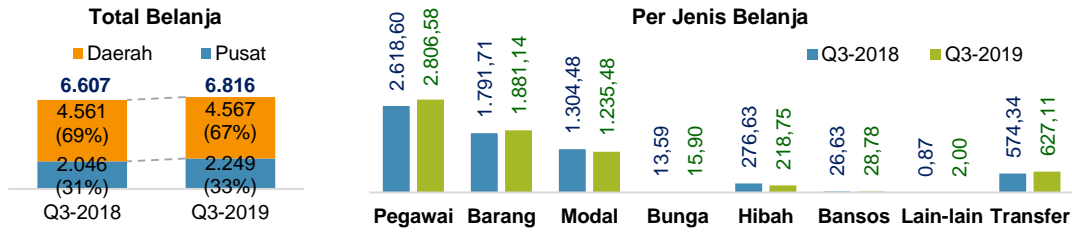
Secara keseluruhan, porsi belanja pemerintah daerah lebih besar daripada belanja pemerintah pusat. Dirinci per jenisnya, belanja pegawai dan belanja barang masih mendominasi struktur belanja konsolidasian Sulbar, dengan proporsi masing-masing sebesar 41 persen dan 28 persen dari total Belanja Konsolidasian sebesar Rp6,82 triliun. Artinya, Sulbar hanya memiliki 31 persen dana yang direalisasikan untuk selain kedua jenis belanja tersebut. Porsi Belanja Modal hanya sebesar 18 persen. Melihat besarnya porsi belanja pegawai pemda, maka pihak pemda perlu merumuskan kebijakan efisiensi belanja pegawai untuk memperlebar ruang fiskal daerah.



Belanja Konsolidasian Rp6.815,74 miliar didominasi Belanja Daerah pada kelompok Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

### 4.3.2 Analisis Perubahan

Grafik 4.4 Perubahan Realisasi Belanja Konsolidasi Sulbar Triwulan III Tahun 2018-2019 (Rp Miliar)



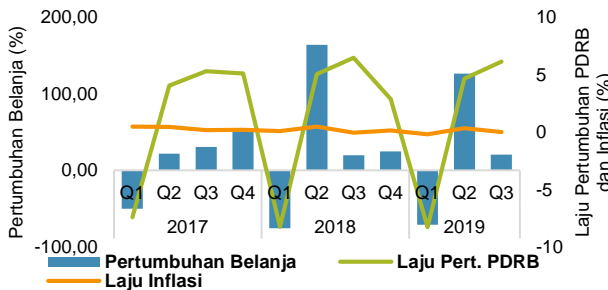
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar, OMSPAN; SIKD, 2018-2019 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Belanja Konsolidasi Sulbar tumbuh 3,16 persen. Ekspansi belanja Sulbar terjadi hampir di semua jenis belanja, kecuali Belanja Modal dan Hibah. Walaupun belanja modal pemerintah pusat meningkat 23,42 persen, akan tetapi kontraksi belanja modal pemda sebesar 21,13 persen menyebabkan belanja modal konsolidasi terkontraksi 5,29 persen (yoy). Kontraksi belanja modal pemda diantaranya berkorelasi dengan lambatnya penyelesaian proses pengadaan pada beberapa OPD disusul dengan adanya pergeseran waktu pada tahapan pencairan DAK Fisik.


 Agregat Belanja Konsolidasi tumbuh 3,16% (yoy)

### 4.3.3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional

Grafik 4.5 Hubungan Pertumbuhan Belanja Pemerintah Konsolidasi dengan Indikator Makro Ekonomi Sulbar



Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS Sulbar, 2017-2019 (data diolah)

 Belanja Pemerintah berhubungan linear dengan pertumbuhan ekonomi Sulbar.

Grafik di samping menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah (*q to q*) memiliki hubungan yang linear dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan terhadap laju inflasi, kemungkinan terdapat variabel lain yang lebih berpengaruh sehingga tampak lebih terkendali di tengah fluktuasi perkembangan belanja.

Secara kumulatif, belanja pemerintah dan transfer mengalami kenaikan 3,16 persen. Peningkatan tersebut telah berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 4,89 persen (*c to c*). Akselerasi belanja pemerintah diharapkan mampu menggiring naik laju pertumbuhan tersebut di kuartal IV mengingat masih terdapat 37 persen sisa anggaran yang belum terealisasi.

Dampak kebijakan fiskal sampai dengan triwulan III 2019 terhadap indikator kesejahteraan masyarakat regional Sulbar, antara lain realisasi transfer Dana Desa yang menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya, dari Rp145 miliar di tahun 2015 menjadi sebesar Rp336,14 miliar sampai dengan kuartal ketiga tahun ini. Pada periode yang

sama, tren jumlah penduduk miskin perdesaan juga berkurang signifikan sebanyak 12.970 jiwa dari 133.090 jiwa pada Maret 2015 menjadi 120.120 jiwa pada Maret 2019.

Meskipun pemerintah Sulbar mencatatkan prestasi dengan angka tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya, namun efektivitas dari implementasi setiap program dan kegiatan terutama yang menyoar penanggulangan kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja penting untuk dipantau dan dievaluasi.

Porsi anggaran yang ditujukan untuk program pengentasan kemiskinan perlu diperbesar melalui upaya peningkatan PAD dan efisiensi belanja operasional pemerintah guna memperlebar ruang fiskal. Pergeseran skema penanggulangan kemiskinan dari program yang berdampak langsung seperti Bansos menjadi program pemberdayaan juga turut berkorelasi dengan *time lag* pengaruh atau dampak belanja pemerintah terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

#### 4.4 Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB

Tabel 4.3 Kontribusi Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap PDRB (ADHB) Sulbar s.d. Triwulan III 2019 (Rp Miliar)

<b>PDRB ADHB</b>	<b>32.807,00</b>
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>5.921,74</b>
- Kompensasi Pegawai	2.723,09
- Penggunaan Barang & Jasa	1.783,58
- Bunga	15,90
- Hibah	1.136,39
-Bantuan Sosial	28,78
-Lain-lain	234,01
<b>Transaksi Aset Non Keuangan Neto</b>	<b>1.235,48</b>
-Aset Tetap	1.155,23
-Persediaan	0,00
-Barang Berharga	0,00
-Aset Nonproduksi	80,26
<b>Kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB</b>	<b>18,05%</b>
<b>Kontribusi Insvestasi Pemerintah terhadap PDRB</b>	<b>3,52%</b>

Sumber: LO GFS Kanwil DJPb Prov. Sulbar Triwulan III 2019; BPS Subar, 2019 (diolah)

Dalam kondisi perekonomian Sulbar yang sedang melambat, maka kontribusi pemerintah yang berupa pengeluaran konsumsi pemerintah sangat dibutuhkan. Sisa pagu anggaran sebesar 37 persen diharapkan dapat direalisasikan secara optimal pada kuartal terakhir tahun ini, sehingga cukup mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulbar. Perlu menjadi perhatian bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mengawal efektivitas dan efisiensi pelaksanaan/pencairan anggaran.

Berdasarkan data dari Laporan Operasional *Government Finance Statistics (GFS)* Kanwil DJPb Provinsi Sulbar, pengeluaran konsumsi pemerintah Sulbar sebesar Rp5.921,74 miliar dan berkontribusi sebesar 18,05 persen terhadap PDRB.

Sementara itu, realisasi investasi pemerintah sebesar Rp1.155,23 miliar dan hanya berkontribusi sebesar 3,52 persen terhadap PDRB Sulbar.



Konsumsi Pemerintah telah berkontribusi sebesar 18,05% terhadap PDRB, sedangkan Investasi Pemerintah berkontribusi sebesar 3,52%.

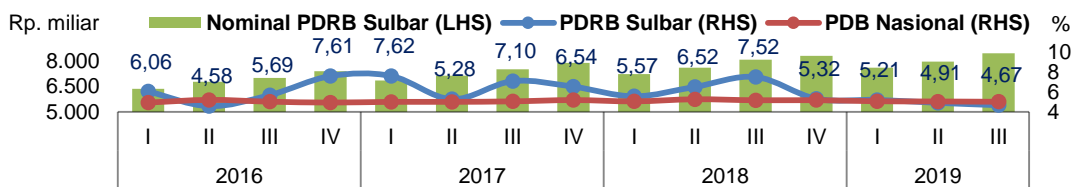
### 5.1 Urgensi Optimalisasi Peran Fiskal dalam Upaya Mengakselerasi Laju Perekonomian Sulbar



Pelambatan laju perekonomian dalam 2 tahun terakhir menjadi peringatan bagi para pemangku kepentingan di Sulbar.

Laju pertumbuhan ekonomi Sulbar menunjukkan perlambatan dalam dua tahun terakhir. Di tahun 2019, Laju PDRB Sulbar secara triwulanan belum mampu menyentuh angka 6 persen. Terkini, pertumbuhan ekonomi Sulbar melemah dari 4,91 persen (yoy) di triwulan II 2019 menjadi 4,67 persen (yoy) di triwulan III 2019<sup>2</sup>. Hal tersebut menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah di Sulbar. Terlebih, tren tersebut timbul saat harga kebutuhan pokok masyarakat stabil. Indikasinya, inflasi Sulbar sampai dengan Oktober 2019 rata-rata sebesar 0,16 persen, lebih terkendali dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,27 persen.

Grafik 5.1 Perkembangan PDRB Sulbar (yoy) dan PDB Nasional Tahun 2016 - 2019



Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Sulbar (diolah)

Dari sisi Lapangan Usaha, terdapat penurunan kontribusi beberapa sektor usaha dominan terhadap PDRB Sulbar. Pada akhir 2018, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi laju pertumbuhan sebesar 0,81 persen (yoy). Pelemahan ini dipicu oleh perlambatan laju pertumbuhan usaha Tanaman Pangan yang hanya tumbuh sebesar 5,16 persen (yoy) pada tahun 2018 setelah dua tahun sebelumnya tumbuh pada kisaran 28 persen (yoy). Hal ini berdampak terhadap total PDRB Sulbar mengingat sektor tersebut berkontribusi sebesar 38,95 persen.

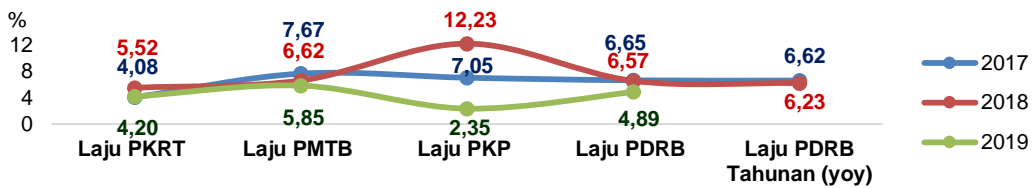
Kondisi di atas menunjukkan pentingnya keberadaan sektor ekonomi lainnya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi saat sektor basis mengalami kelesuan. Kelompok usaha Industri Pengolahan menjadi lapis kedua kontributor PDRB Sulbar dengan sumbangan sebesar 10,78 persen pada 2018. Namun, laju sektor tersebut turut melambat dari 9,59 persen pada 2017 menjadi hanya 6 persen pada 2018. Tren ini diperkirakan berlanjut pada 2019 mengingat subkelompok utama yakni usaha Industri Makanan mengalami penurunan produksi sebesar 3,37 persen pada triwulan III 2019<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Sulbar Express, *Ekonomi Sulbar Alami Perlambatan*, 6 November 2019, hlm. 1

<sup>3</sup> BPS Provinsi Sulbar, *BRS Pertumbuhan Industri Manufaktur*, No. 50/11/76/Th. XIII, November 2019, hlm. 3.


Dari sisi Pengeluaran, nampak bahwa laju komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh negatif. Hal tersebut berimbas kepada penurunan capaian total PDRB Sulbar pada triwulan III 2019 mengingat PKRT, PMTB, dan PKP merupakan sumber pertumbuhan utama dengan kontribusi masing-masing sebesar 48,35 persen, 29,34 persen, dan 20,48 persen.

Grifik 5.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Sulbar Triwulan III (c to c) menurut Pengeluaran



Sumber: BPS Provinsi Sulbar (diolah)

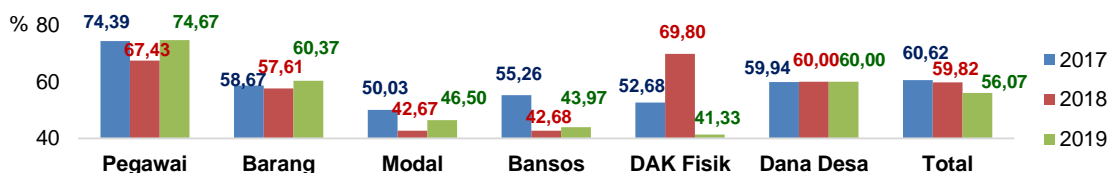
Akselerasi PMTB Sulbar dari sisi investasi swasta belum dapat diandalkan mengingat sektor swasta masih menahan diri untuk melakukan ekspansi bisnis sehubungan dengan melemahnya pertumbuhan perekonomian di skala nasional sebagaimana diungkap oleh Ketua KADIN Indonesia<sup>4</sup>. Untuk menghadapi tantangan di atas, pemerintah menjadi dapat berperan dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang tepat agar fungsi fiskal sebagai stabilisator pertumbuhan ekonomi dapat terwujud, antara lain yaitu:

 Dalam rangka menghadapi tantangan pelambatan laju perekonomian, pemerintah perlu melakukan ekspansi dan akselerasi realisasi belanja guna menstimulasi gerak roda ekonomi Sulbar.

### 1. EKSPANSI DAN AKSELERASI BELANJA PEMERINTAH

Saat perekonomian lesu, pemerintah daerah Sulbar perlu menempuh kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dan akseleratif. Urgensi tersebut tercermin pada perlambatan kinerja penyerapan belanja pemerintah di wilayah Sulbar dalam tiga tahun terakhir. Capaian realisasi belanja APBN Sulbar sampai dengan kuartal ketiga 2019 mengalami penurunan sebesar 6,27 persen dibandingkan capaian penyerapan pada periode yang sama di tahun 2018. Sampai dengan 7 November 2019, penyerapan belanja APBN menyentuh 69,35 persen. Demikian halnya dengan penyerapan APBD Sulbar yang baru terserap sebesar 65 persen sampai dengan tanggal 4 November 2019.

Grifik 5.3 Perkembangan Persentase Realisasi APBN Sulbar s.d. Triwulan III 2019 per Jenis Belanja



Sumber: Monev PA, OMSPAN (diolah)

<sup>4</sup> DetikFinance, *Ekonomi RI Lesu, Pengusaha Ogah Kembangkan Bisnis*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4773455/ekonomi-ri-lesu-pengusaha-ogah-kembangkan-bisnis/1> pada 6 November 2019.

Dari data dimaksud tersirat bahwa penurunan kinerja penyerapan Belanja Modal dan DAK Fisik tahun 2019 linear dengan perlambatan laju perekonomian Sulbar. Oleh karena itu, realiasi belanja pemerintah khususnya belanja infrastruktur perlu diakselerasi sedini mungkin agar optimal dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi Sulbar.

## 2. PERCEPATAN PENYELESAIAN KONTRAK KEGIATAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terungkap bahwa penurunan kinerja penyerapan belanja berkorelasi dengan keterlambatan penyelesaian lelang kegiatan. Satker menemui kendala dalam menyelesaikan proses tender yang umumnya baru selesai menjelang akhir semester pertama. Hal ini berimbas kepada tertundanya pelaksanaan pekerjaan fisik yang memiliki efek pengganda signifikan terhadap ekonomi Sulbar. Roda ekonomi daerah menjadi lambat berputar.


Untuk mengatasi hal tersebut, seyogianya satker dapat memanfaatkan fasilitas lelang pra-DIPA atau pra-RKA. Namun, terdapat tantangan dari sisi aspek legalitas berupa keterlambatan penetapan para pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara) yang semestinya dilakukan di akhir tahun anggaran sebelumnya<sup>5</sup>. Diperlukan sinergi dan monitoring berkelanjutan baik di internal satker maupun dengan pihak eksternal seperti Kementerian Keuangan, Badan Keuangan Daerah, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) guna menyelesaikan proses lelang kegiatan sedini mungkin.


## 3. PENINGKATAN ALOKASI FISKAL YANG BERPIHAK PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

Postur APBD Sulbar yang 59 persen di antaranya dialokasikan untuk Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa perlu direstrukturisasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran kepada kegiatan yang mendukung pertumbuhan UKM di wilayah Sulbar, baik dari segi jumlah maupun daya saing usaha. Peningkatan pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil triwulan III 2019 sebesar 18,56 persen (yoy) menjadi bukti bahwa UKM dapat berkembang saat laju perekonomian Sulbar melambat.

Pemerintah daerah dapat berkontribusi untuk mengembangkan UKM dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun fiskal sebelumnya untuk diinvestasikan ke dalam pembiayaan UMi yang dikhususkan untuk wilayah Sulbar. Dengan demikian perekonomian kerakyatan dapat terbantu dari sisi permodalan usaha dan diharapkan dapat menjadi penopang laju PDRB Sulbar saat usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kelesuan.

<sup>5</sup> Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, *Upaya Peningkatan Perekonomian Dalam Rangka Mendorong Kebijakan Fiskal Sulbar*, disampaikan dalam Seminar Outlook Ekonomi dan Fiskal Sulbar 2020 tanggal 20 Oktober 2019.

 Penyelesaian kontrak kegiatan pemerintah perlu dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan sinergi antar unit terkait.

 Peningkatan pertumbuhan produksi sektor UKM di tengah perlambatan laju ekonomi menjadi sinyal perlunya dukungan alokasi belanja pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan di Sulbar.





**KEMENTERIAN KEUANGAN**

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT





**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 3 JALAN SOEKARNO HATTA MAMUJU SULAWESI BARAT 91511, TELEPON (0426) 2325034 FAKSIMILI (0426) 2325033 WEBSITE [www.perbendaharaansulbar.org](http://www.perbendaharaansulbar.org)

NOTA DINAS  
NOMOR ND-558/WPB.26/2019

Yth. : Direktur Pelaksanaan Anggaran  
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat  
Sifat : **Segera**  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Sulawesi Barat Triwulan III 2019  
Tanggal : 12 Nopember 2019

Memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, dengan ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2019 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun *softcopy* laporan dalam bentuk file *pdf* telah disampaikan ke alamat *email* [ditpa@kemenkeu.go.id](mailto:ditpa@kemenkeu.go.id) cc [lo.ditpa@gmail.com](mailto:lo.ditpa@gmail.com).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik



Plt. Kepala Kantor

Fahma Sari Fatma